

## Pengantar

Laporan bulanan ini mendata sejumlah kasus yang terjadi sepanjang bulan September hingga awal Oktober. Selama periode ini, banyak kasus keagamaan yang muncul, baik menyangkut penyesatan, penyerangan terhadap kelompok tertentu, sampai penyerangan terhadap rumah makan yang tetap buka di siang bulan Ramadhan. Di banding edisi sebelumnya, edisi ini adalah periode terbanyak memunculkan kasus. Belum lagi, kasus-kasus yang tidak tercover dalam laporan ini yang mungkin jauh lebih banyak. Kenyataan ini menguatkan dugaan, konflik antar aliran keagamaan, persekusi antar kelompok terus terjadi, tanpa ada penyelesaian yang memuaskan. Laporan ini bukan dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, tapi masyarakat bisa mengambil pelajaran darinya. Selanjutnya perlu keseriusan pihak-pihak yang berwenang mengantisipasi penyebabnya agar kasus-kasus itu tidak terulang lagi, meskipun keinginan ini mungkin terlalu mewah untuk kehidupan beragama di Indonesia.

### Susunan Redaksi

Penanggung Jawab: Yenny Zannuba Wahid, Ahmad Suaedy | **Pemimpin Redaksi:** Rumadi | **Sidang Redaksi:** Ahmad Suaedy, Gamal Ferdhi, Nurul H Ma'arif, Abd Moqsih Ghazali. **Staf Redaksi:** M. Subhi Azhari dan Nurun Nisa' | **Lay out:** Widhi Cahya  
**Alamat Redaksi:** The Wahid Institute, Jln Taman Amir Hamzah 8 Jakarta - 10320  
**Website:** [www.wahidinstitute.org](http://www.wahidinstitute.org)  
**Email:** [info@wahidinstitute.org](mailto:info@wahidinstitute.org)

# MUI, Penyesatan Keyakinan dan Kekuasaan

## 1. Kasus Nabi di Madiun

AWAL September 2007, Madiun digegerkan dengan munculnya seorang "nabi" baru. Adalah Rusmiyati binti Sawabi Sastrawiharja (51), warga Jalan dr. Cipto No. 3 Kota Madiun, yang mengaku sebagai nabi, ratu adil, juru selamat dan wanita yang mendapat petunjuk dari langit. Rusmiyati bersikukuh bahwa ia telah mendapat petunjuk untuk menyampaikan ajaran baru bagi umat manusia.

Bila misi yang diembannya telah sampai kepada seluruh umat manusia, maka tugas selanjutnya akan diserahkan kepada alim ulama dan pemuka agama. "Saya yakin semakin-yakinnya bahwa misi yang saya emban telah diatur Tuhan Yang Maha Esa. Jika Tuhan berkehendak jadi, maka jadilah. Tidak akan ada yang sanggup menghalangi. Sebaliknya jika saya dianggap keliru, maka saya sekali lagi meminta ganti atas petunjuk ini agar seluruh umat dibelakang saya juga mendapat jalan terang," kata Rusmiyati.

Selain itu, dia meminta tiga permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa: 1) agar semua umat manusia di seluruh dunia ikhlas menerima Kitabullah dan Sunnah Rasul; 2) agar umat manusia di seluruh dunia diberikan petunjuk, tuntutan, dan jalan agar dapat mentaati semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya; 3) agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan makan dan pekerjaan yang layak kepada seluruh umat yang menderita dan kurang beruntung.

Menurutnya, ia telah tiga kali diwisuda yaitu sebagai ratu adil, yaitu pada Selasa, 30 Mei 2006 lalu setelah Yogyakarta diguncang gempa, sebagai juru selamat pada peringatan hari lahirnya Nabi Isa Almasih pada 25 Desember 2006 lalu dan pada 20 Mei 2007 sebagai pemimpin wanita yang mendapat petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa. "Saya tidak punya kepentingan apa-

apa, namun saya telah ditunjuk menjadi panglima perang melawan iblis,” kata ibu dua anak ini yang memeluk agama Islam pada tahun 1965 setelah sebelumnya sempat memeluk agama Katolik dan aliran Kejawen.

Rusmiyati mengaku ditunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui mimpi-mimpi dan berbagai aktifitas. Ia mengaku telah diangkat sebagai panglima perang untuk melawan kebathilan. Petunjuk-petunjuk itu selalu datang pada saat terjadi musibah di muka bumi ini. Petunjuk melalui mimpi itu dituangkan dalam bentuk tujuh naskah ilmu dari langit.

Naskah pertama berjudul Falsafah Pancasila Obor Perdamaian Dunia. Kedua berjudul, Penjabaran Falsafah Pancasila. Ketiga, Landasan Dasar Mencegah Timbulnya Tindakan Kekerasan. Keempat, Landasan Dasar Mengatasi Masalah Korupsi. Kelima, Landasan Mengatasi Masalah Generasi Muda yang Kurang Beruntung. Keenam, Landasan Menyelesaikan Masalah Zina. Naskah terakhir berjudul Sumber Hukum UU anti Ponrografi dan Pornoaksi.

Atas pengakuannya tersebut, MUI Kota Madiun, bertempat di ruangan Kasubag Tata Usaha Kandepag Kota Madiun, menginterogasi Rusmiyati (5/9/07). Rusmiyati menjelaskan prosesi wisudanya di hadapan pengurus MUI. Ibu beranak dua ini mengatakan, petunjuk didapatnya saat dirinya tidur. Saat itu, kata Rusmiyati, dirinya naik ke langit hingga tiba ke suatu ruangan indah yang hanya ada dia sendiri. “Saya menerima mimpi aneh berkali-kali dan petunjuk langsung ke hati. Kalau saya tidur, seperti naik ke langit, ada ruangan luas dan saya terus bertasbih. Petunjuk yang saya butuhkan, langsung masuk ke hati,” kata muallaf sejak tahun 1965-an ini.

Rusmiyati selanjutnya mengatakan, selama ini tak ada ancaman yang datang ke dirinya. “Kalau memang saya dinilai salah, saya akan berhenti. Tetapi, saya akan gan-

ti ilmu, agar 80 persen yang ada di dunia ini yang belum faham, bisa tahu. Jangan berburuk sangka kepada saya. Saya hanya minta, bahwa apakah ini haq atau bathil,” paparnya dengan tenang.

Di hadapan pengurus MUI, Rusmiyati meminta para ulama yang ada di lembaga itu memberikan legitimasi atas tiga “jabatan” yang diembannya. “Saya mohon kepada MUI agar lebih seksama dan berhati-hati dalam mempelajari dan mendalami naskah yang saya sampaikan itu. Jangan diremehkan karena ini semua petunjuk Tuhan YME, “ungkap wanita yang memiliki lima cucu ini (*Radar Madiun*, 6/9/07).

“Saya hanya minta MUI agar bersikap adil, harus mau memahami, melindungi dan menjawab pertanyaan umat. Bukan menvonis, apa yang saya lakukan ini cuma bertanya,” katanya. Rusmiyati dengan tegas mengatakan, ajarannya itu dia terima dari langit bukan hanya untuk kemaslahatan umat di Madiun saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia di dunia sampai pada akhirat nanti. “Kalau saya dinilai sesat, atau mimpi-mimpi yang saya alami berasal dari setan, silakan baca dan pahami dulu isi naskah ilmu dari langit ini. Kalau saya diminta berubah, tolong gantikan peran saya dan beri bimbingan kepada saya agar 80 juta umat yang berada di belakang saya juga mendapat petunjuk,” katanya ([www.antara.co.id](http://www.antara.co.id) 9/9/07).

Ketua MUI Kota Madiun, KH M Sutoyo mengatakan, pihaknya memanggil setelah Rusmiyati mengirimkan beberapa kali buku karyanya. “Kami ingin tahu penjelasannya, maka diminta presentasi. Nanti akan kami rapatkan kembali di MUI untuk menyikapinya,” katanya. Rencananya, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun akan kembali memanggil Rusmiyati untuk diambil keputusan apakah naskah-naskah yang dikirimkan boleh atau tidak disebarluaskan ke khalayak umum. Sutoyo sendiri sempat melontarkan bahwa kemungkinan besar pihaknya tidak

akan memberikan rekomendasi penerbitan tujuh naskah itu. MUI Kota Madiun juga akan meminta bantuan kepada NU, Muhammadiyah, atau organisasi lain untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Rusmiyati.

Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kota Madiun, H. Dimiyati, saat dimintai tanggapan mengenai permintaan MUI tersebut menyatakan menyanggupi. "Kami bersedia memberi bimbingan dan arahan kepada Rusmiyati karena dia perlu mendapat bimbingan itu," ujar Dimiyati. Menurut dia, pengakuan Rusmiyati ditunjuk sebagai Ratu Adil, Juru Selamat, dan panglima perang wanita melawan tipu daya iblis dia nilai sebagai sesuatu yang berlebihan. Sebab, kata dia, di dalam konsep Islam tidak boleh memandang diri seorang manusia seperti itu karena manusia makhluk yang serba memiliki kekurangan.

Dimiyati mengatakan, pengakuan Rusmiyati sebagai ratu adil lewat petunjuk dalam mimpi-mimpi itu hanyalah rekayasa hasil budaya dan bisa dipastikan bukan petunjuk langsung dari Allah SWT. Kalau ada seorang manusia mengangkat dirinya orang suci dan mendapat petunjuk, kata Dimiyati, bisa dipastikan dirinya sedang mendapat bisikan dari jin atau setan. Manusia biasa tentu saja berbeda dengan para nabi dan rasul yang telah mendapat wahyu dan menyampaikannya. Jika dibiarkan terus maka ajaran yang disampaikan Rusmiyati bisa memicu timbulnya keresahan masyarakat. Oleh karena itu, kata Dimiyati, pihaknya juga meminta kepada MUI Kota Madiun untuk segera memutuskan permasalahan ini. Hingga laporan ini ditulis, MUI Kota Madiun belum memberi sikap resmi atas ajaran Rusmiyati ini. Namun demikian, dari berbagai komentar yang diberikan tokoh-tokoh agama di Madiun bisa diindikasikan bahwa Rusmiyati akan difatwa sesat, atau minimal akan ditekan supaya tidak menyebarkan ajarannya kepada masyarakat luas.

## 2. Pembubaran Paksa Ibadah HKBP Rajeg Tangerang

BEBERAPA hari sebelum umat Islam memasuki bulan suci Ramadhan 1428 H, terjadi penyerangan dan pembubaran paksa terhadap kegiatan peribadatan umat Kristiani di Tangerang Banten. Kejadian ini menimpa jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rajeg yang beralamat di Blok B 8 No 8 Perum Sukatani Permai, Rajeg, Resort Kutabumi, Tangerang, Banten pada Minggu 2 September 2007 lalu.

Penyerangan ini bermula dari diadakannya kegiatan pesta lelang dan ibadah kebaktian dalam rangka pengumpulan dana pengadaan tanah untuk pendirian rumah ibadah HKBP Rajeg. Kegiatan ini dihadiri tidak kurang dari 200 jemaat, terdiri dari warga HKBP Rajeg dan beberapa warga jemaat lain di luar wilayah tersebut. Selain itu, HKBP Rajeg juga mengundang seorang pendeta dari HKBP Wilayah DKI Jakarta untuk memimpin kegiatan tersebut.

Permohonan izin tertulis kepada RT/RW, Kapolsek dan Koramil telah dilayangkan dan mendapat sambutan yang positif. Karena itu, sehari sebelumnya berlangsung diadakan gotong royong berupa pemasangan tenda di halaman rumah seorang pendeta yang selama ini dipergunakan sebagai tempat ibadah.

Kegiatan ibadah berjalan lancar hingga pada siang harinya terdengar suara keras dari puluhan massa yang menyerukan agar kegiatan ibadah dihentikan. Massa yang kemudian diidentifikasi sebagian merupakan warga sekitar itu semakin brutal dan tanpa kendali melempari jemaat dengan batu, merobohkan tenda dan merusak barang-barang yang mereka temui di dalam rumah milik Pendeta Erna Bs Hasugian yang tidak lain adalah pimpinan HKBP Rajeg. Dua polisi dari Polsek Rajeg yang sejak awal sudah berada di lokasi kejadian tidak bisa berbuat banyak menghadapi 100 lebih massa yang sudah marah. Karenan-

ya selain barang-barang yang rusak, tiga orang termasuk Pdt. DAU Dolaksaribu, Praeses Distrik Jakarta 2, pimpinan ibadah hari itu terluka cukup parah terkena lemparan batu.

Dalam pandangan Gomar Gultom, salah seorang pengurus Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), ketidakmampuan polisi mengendalikan massa menunjukkan sikap yang tidak profesional sebagai penegak hukum. "Mereka seharusnya bisa mencegah kejadian seperti itu, apalagi ini dilakukan warga sekitar. Mereka kan punya intel," kata Gomar.

Selain itu, Majelis Pekerja Harian PGI dalam siaran persnya tanggal 3 September 2007 mengecam dan menyesalkan kejadian tersebut. "Bersama ini, MPH PGI memohon dengan sangat kepada Gubernur Banten dan Kepala Kepolisian RI segera mengusut dan menindak para pelaku yang main hakim sendiri dengan melakukan tindakan anarkis serta menjamin berlakunya kebebasan menjalankan ibadah," bunyi release tersebut.

### **Sekilas tentang HKBP Rajeg**

HKBP Rajeg yang beranggotakan 50 Kepala Keluarga (KK) telah membentuk kebaktian sejak tahun 2000. Karena keterbatasan dana untuk membangun gereja, selama ini para warga jemaat beribadat berpindah-pindah dari rumah ke rumah anggota jemaat. Dalam waktu 5 tahun warga jemaat telah mengumpulkan dana dan membeli sebuah rumah di Blok B 8 No 8 Perum Sukatani Permai. Sejak tahun 2005 rumah tersebut telah dipergunakan sebagai sekretariat dan tempat tinggal Pdt. Erna Bs Hasugian. Tempat ini juga menjadi tempat kebaktian umum 1 x 1 bulan atas kesepakatan secara lisan bersama dengan warga setempat.

Selama ini proses peribadatan di HKBP Rajeg berjalan tanpa ada rintangan apapun. Namun mengapa keadaan yang sedemikian kondusif tiba-tiba berubah menjadi

mencekam? Menurut Gomar, penyerangan ini dipicu oleh kurangnya sensitifitas pihak HKBP Rajeg yang menyelenggarakan pesta besar dengan mengundang jemaat dari luar gereja tersebut. "Kalau saya melihat ada sedikit kurang bijak juga jemaat itu, dimana dalam kondisi belum memiliki ijin sudah mengundang jemaat dari luar, meskipun sejauh ini belum pernah ada problem dengan masyarakat setempat," jelas Gomar.

Lebih lanjut, dia juga mensinyalir adanya pihak-pihak yang memprovokasi massa sehingga berbuat anarkis. "Dalam kejadian tersebut, rupanya ada tiga orang yang diduga menjadi provokator, mereka orang situ dan sudah ditangkap polisi," tambahnya. Para provokator tersebut lanjut Gomar adalah orang-orang sekitar tempat kejadian yang tidak jelas motifnya. Mereka memanfaatkan moment pesta pada hari itu untuk memunculkan rasa antipati masyarakat terhadap keberadaan gereja.

Upaya lain yang dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada Komnas HAM, dan ini menurut Gomar cukup efektif. Terbukti, sehari setelah pertemuan pihak gereja dengan Komnas HAM, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku penyerangan.

### **Kembali Beribadah.**

PENYERANGAN yang dialami HKBP Rajeg menimbulkan trauma bagi para warga gereja. Mereka khawatir kejadian serupa akan terulang dimasa-masa mendatang. Dengan kejadian tersebut, para warga gereja kembali mempertanyakan komitmen masyarakat sekitar yang selama ini menerima keberadaan gereja. Ada keragu-raguan apakah pemicu kejadian tersebut hanya kegiatan pesta pada hari itu ataukah gambaran dari penolakan masyarakat terhadap keberadaan gereja. Berbagai pertanyaan di atas menjadi dorongan bagi HKBP Rajeg, sehingga lahirlah pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak.

Dalam pertemuan tersebut, pihak gereja sepakat untuk mencabut laporan kepada pihak kepolisian sehingga beberapa orang yang ditangkap dibebaskan. Sementara dari pihak masyarakat sepakat memberi ijin berlangsungnya kegiatan peribadatan kembali dan berjanji tidak akan mengganggu. Di luar berbagai kesepakatan yang dicapai, satu hal yang disayangkan, berbagai kesepakatan tidak dilakukan secara tertulis yang bisa menjadi jaminan bagi masing-masing pihak.

Saat ini HKBP Rajeg sudah kembali melaksanakan kegiatan peribadatan di tempat tersebut. Mereka mengambil banyak pelajaran dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali karena selain menimbulkan kerugian baik moril maupun materil juga melanggar hak konstitusi setiap masyarakat untuk melaksanakan ibadah secara bebas dan merdeka.

### **3. LDII: di Sini Diserang, di Sana Membubarkan**

SELAMA bulan September ini, setidaknya ada tiga kasus menyangkut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): 1) Mushalla LDII diserang di Jember; 2) LDII menyerang pengajian Ansor di Mojokerto; dan 3) masjid LDII diserang di Kerinci. Berikut ini akan diuraikan masing-masing dari ketiga kasus tersebut.

#### **a. Warga Jember Merusak Mushalla LDII**

MUSHALLA yang belum sempurna LDII di Tanggul Wetan, Jember, Jawa Timur dirusak ratusan warga, Rabu (19/9/07) malam. Akibatnya, bangunan semi permanen tersebut nyaris rata dengan tanah. Peristiwa itu terjadi pada pukul 20.15 wib, setelah jamaah LDII selesai melakukan shalat tarawih.

Ratusan warga datang membawa sejumlah peralatan seperti cangkul, palu serta

batu langsung menyerbu beramai-ramai. Tak ayal, hanya sekitar 10 menit, mushalla seluas 8 X 10 meter itu rata dengan tanah. Meski demikian, massa tidak sampai melukai atau menyerang warga LDII. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Massa datang, merusak, lalu pergi.

Sekitar 30 menit kemudian, aparat kepolisian datang mengamankan lokasi. Sejumlah anggota jamaah dan warga sekitar diperiksa di kantor Kepolisian Sektor Tanggul. “Berdasarkan informasi warga, memang mushalla itu dibangun tanpa ijin, atau tidak disetujui warga sekitar,” kata Kepala Kepolisian Resor Jember, Ajun Komisaris Besar Polisi Adang Ginandjar. Apalagi, kata Adang, di 30 meter sebelah utara musholla LDII telah berdiri sebuah musholla Al-Amal yang dibangun warga setempat.

Camat Tanggul, Dwi Setya Nusantara mengatakan, memang pembangunan mushalla LDII menjadi kontroversi di kalangan warga setempat sejak Mei 2007 lalu. “Warga juga sudah kami ajak musyawarah tetapi rupanya jamaah LDII diam-diam tetap membangun meskipun warga menolak,” katanya.

Hingga laporan ini ditulis, kondisi mulai tenang. Namun demikian hal ini tidak berarti semua masalah selesai. Bila tidak diselesaikan akar masalahnya, bukan tidak mungkin peristiwa yang sama akan terjadi di masa mendatang.

#### **b. Pengajian Ansor Mojokerto Dibubarkan LDII**

PENGAJIAN dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan yang dilakukan oleh GP Ansor Kabupaten Mojokerto, dibubarkan oleh orang yang diduga pengikut LDII. Pengajian dalam bentuk safari Ramadhan itu, dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Huda, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Ahad (23/9/07).

Karena didesak kelompok tertentu, Ali Sofyan, Kepala Desa setempat, memaksa

GP Ansor untuk membongkar seluruh bendera yang dipasang di pinggir jalan. Ia juga meminta agar pengajian tersebut dibubarkan dan meminta kepada perwakilan untuk segera menghadapnya. Bahkan pihaknya juga mengancam, jika pengajian tersebut diteruskan, akan mendatangkan pasukannya.

Meski mendapat ancaman, pengajian tersebut masih tetap berlanjut hingga buka puasa. Sekitar pukul 18.00 WIB, ratusan GP Ansor beserta Bansernya, langsung mendatangi rumah Ali Sofyan. Dalam aksi tersebut, Ali Sofyan langsung melarikan diri dari rumahnya dan selamat dari amukan massa. Akhirnya massa melampirkan kemarahan mereka dengan mengobrak-abrik rumah milik Ali Sofyan.

Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim, H Abdul Muchid, yang juga warga setempat, mengatakan, Ali Sofyan memang merupakan kelompok dari LDII. "Kita ini melakukan pengajian di pondok. Tidak ada aturan untuk ijin. Hanya karena dia (Ali Sofyan-red) itu, merupakan orang LDII, sehingga meminta pengajian GP Ansor ini dihentikan," kata Muchid. Apalagi, lanjut Muchid, pakai mengancam dengan mendatangkan pasukannya. "Silahkan datangkan pasukan itu. Apa dikira kita ini tidak berani, minta didatangkan berapa anggota Banser. Kita ini juga sudah meminta maaf pada dia, kalau memang hanya karena ijin," ujar Muchid.

Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Mojokerto, H Heri Ermawan, mengatakan, menyikapi kasus ini, pihaknya juga langsung memusyawarahkan hal tersebut dengan PCNU setempat. "Kami akan konsultasikan dengan para ulama dulu. Apapun keputusannya, kita akan siapkan barisan. Karena bagaimanapun ini sudah menginjak pada persoalan ideologi kita," kata Heri.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Erlang Dwi Permata, meminta hal ini agar tidak dibesar-besarkan. Karena hal

tersebut hanya merupakan keributan biasa saja. "Persoalan ini hanya kesalahpahaman. Jadi, jangan sampai dibesar-besarkan, yang akhirnya menjadi konflik antar organisasi," kata Erlang. (*Duta Masyarakat*, 24/9/07)

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor merasa tidak terima dengan tindakan LDII yang berani membubarkan pengajian yang digelar Ansor. Karena itu, Ansor mengancam akan membawa kasus tersebut ke hukum, jika LDII tidak segera memohon maaf ke Ansor atau pihak panitia penyelenggara pengajian tersebut. "Arogansi seperti ini harus dilawan dan harus dienyah dari Indonesia. Kalau LDII tidak meminta maaf Ansor akan melakukan dan akan membawa masalah ini ke hukum," ungkap Sekjen PP GP Ansor A. Malik Haramain (24/9/07). Menurut Malik, apapun alasannya, aksi pembubaran tersebut tidak dapat dibenarkan. Atas kejadian tersebut, katanya, Ansor merasa dihina dan menjadi korban intimidasi oleh LDII. Menanggapi alasan tidak ada izin yang dikemukakan pihak kepala desa, Malik mengatakan, bahwa alasan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan karena pengajian tersebut digelar di dalam pondok pesantren. "Pengajian tersebut 'kan digelar di pondok pesantren. Jadi ada sentimen kelompok juga," katanya.

Sementara itu, Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Mojokerto, mendesak agar Ali Sofyan membuat pernyataan permintaan maaf secara terbuka kepada GP Ansor dan masyarakat luas pada umumnya. Sebab, dampak dari pemaksaan pembubaran pengajian, serta pembongkaran seluruh bendera GP Ansor yang dipasang di pinggir jalan, dinilai telah mengganggu sendi-sendi kehidupan. (*Duta Masyarakat*, 25/9/07)

Hingga laporan ini dibuat, pihak LDII belum menyatakan sikap penyesalan dan minta maaf. Jika tidak diantisipasi bukan tidak mungkin kasus ini akan berlarut-larut dan menjadi api dalam sekam.

### c. Masjid LDII Kerinci Dibakar

PERTIKAIAN antarwarga satu desa di Kabupaten Kerinci merembet menjadi isu pertentangan antar aliran keagamaan. Kali ini, terjadi antara sesama warga Dusun Kebun Lima, Desa Kebun Baru, Gunung Raya pada Sabtu Malam (22/9/07) pukul 22.00 WIB. Akibat kerusuhan itu, masjid Ansorullah yang merupakan kebanggaan penganut LDII ludes dibakar massa.

Kerusuhan sesama warga Kerinci keturunan Jawa itu meledak usai salat tarawih. Saat itu, pemuda pengikut LDII saling lempar dengan warga setempat. Aksi terus berlanjut hingga terjadi aksi bakar-membakar oleh masyarakat setempat yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penganut LDII. Pertikaian dipicu sikap LDII yang merekrut anggota baru di daerah Dusun Lima Kebun Baru. Padahal, saat pertikaian pertama terjadi tahun 2005 lalu, antara penganut LDII dengan warga Dusun Kebun Lima, Desa Kebun Baru sudah ada perjanjian yang salah satu poin pentingnya tidak memperbolehkan penganut LDII menambah anggota baru dengan dalih apapun di dusun tersebut. Namun, entah bagaimana awal mulanya masyarakat setempat yang tidak bisa menahan diri, saat itu langsung menyerang pengikut LDII yang masih satu keturunan dan satu suku yakni warga Kerinci keturunan Jawa.

Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun masjid Ansorullah LDII habis terbakar. Aksi bakar-membakar itu tidak sempat berlangsung lama lantaran aparat keamanan baik dari kepolisian maupun TNI langsung menuju lokasi mendamaikan warga yang bertikai. Kapolres Kerinci AKBP MM Rachman, sekitar satu jam kemudian setelah aksi pembakaran masjid dan rumah Ketua LDII juga turun membawa pasukan pengamanan lengkap ke Dusun Kebun Lima, Desa Kebun Baru, Gunung Raya. Begitu juga dengan Bupati Kerinci Fauzi Siin yang sedang dalam perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat,

terpaksa berbalik arah ke belakang menuju lokasi kerusuhan.

Bupati didampingi Wakil Bupati Hasani Hamid, tokoh masyarakat Gunung Raya, Hoesni Hasan yang juga Ketua KPUD Kerinci dan Syukur Kela Brajo Asisten Pembangunan, unsur muspida dan sejumlah pejabat dilingkup Pemkab Kerinci tiba di lokasi, sekitar pukul 04.00 WIB dan langsung berusaha menenangkan warga yang bertikai. Sebelum meninggalkan lokasi, Minggu (23/9/07) pagi Bupati meminta kepada warga untuk tenang dan tidak ada bentrok lagi serta tetap menjalankan ibadah puasa dan sore harinya agar dapat dilakukan buka bersama di rumah Hermanto, kepala desa Kebun Baru bersama unsur muspida dan pejabat Pemkab Kerinci (*Rakyat Merdeka, Rabu, 26 September 2007*)

## 4. Penyesatan al-Qiyadah al-Islamiyah

KASUS penyesatan terhadap sebuah kelompok agaknya tak pernah henti. Kali ini menimpa kelompok yang menamakan diri al-Qiyadah al-Islamiyah di Bantul. Sebagaimana kasus serupa di tempat lain, adalah MUI yang menjadi aktor utamanya.

Kisah kelompok ini berawal dari ditangkapnya tiga warga Sedayu, Kabupaten Bantul oleh polisi. Mereka dianggap mengajarkan agama Islam secara sesat yakni salat 5 waktu itu tidak wajib dan tidak penting, yang wajib adalah salat *lail* (malam). Mereka juga mengubah kalimat syahadat. Ketiga orang itu adalah Irawan (22), Tugiman (22) dan Yustinus Sunarto (24). Ketiganya tinggal di Jl Wates KM 12 di Dusun Gayam, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Bantul. Kelompok mereka bernama al-Qiyadah al-Islamiyah. Mereka ditangkap aparat Polres Bantul, pada hari Rabu (19/9/2007) dan saat ini masih diperiksa oleh petugas di Mapolres Bantul di Jl. Sudirman, Bantul. Namun petu-

gas belum bersedia memberikan keterangan resmi karena masih terus melakukan penyelidikan.

MUI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah pimpinan al-Masih al-Ma'ud sebagai ajaran yang menyesatkan. "Kami memang belum membuat fatwa mengenai ajaran itu, tetapi kami sudah menyatakan ajaran ini sesat, bukan Islam, karena secara aqidah sudah meniadakan Nabi Muhammad dan tidak mengakui salat," kata Sekretaris Umum MUI DIY Ahmad Muchsin di Yogyakarta ([www.antara.co.id](http://www.antara.co.id), 20/9/07).

Achmad Muhsin mengungkapkan, buku berjudul *Ruhul Kudus Yang Turun Kepada Al Masih Al Ma'ud* setebal 192 yang diterbitkan kelompok al-Qiyadah al-Islamiyah, memuat tentang kisah Micael Mudas yang dikatakan mendapatkan wahyu di gunung Ijo, Bogor. Disebutkan bahwa Micahel diangkat menjadi nabi dengan nama al-Masih al-Maw'ud.

Ia mengatakan, pihaknya mendengar ajaran ini sekitar Juli 2007 lalu. Menurut dia, kejadian ini merupakan gejala biasa seperti yang terjadi pada beberapa kasus sebelumnya dimana seseorang mengaku sebagai nabi. Sebelumnya, pada Rabu (19/9/07) malam, Polres Bantul mengamankan tiga pemuda warga Dusun Gayam, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Bantul penganut ajaran tersebut. Ketiganya, yakni Irawan, Sunarto dan Tugiman, ditangkap di tempat tinggal mereka di dusun tersebut.

Kasatreskrim Polres Bantul, AK Teguh Wahono, mengatakan, pihaknya mengamankan ketiganya setelah memperoleh informasi rencana penyerangan oleh sebuah ormas yang tidak menginginkan keberadaan ajaran ini. Tetapi ketiganya hanya berstatus sebagai saksi dan sebatas diminta keterangan sebelum akhirnya dibebaskan pada Kamis (20/9/07) siang. Berdasarkan pengakuan tersangka, ajaran mereka tidak mewajibkan shalat lima waktu dan

puasa di bulan ramadhan. "Tetapi salat tahajud pada tengah malam justru wajib dilaksanakan," katanya.

Senada dengan Kasatreskrim Kapolres Bantul AKB Yusmanjaya juga menyatakan tidak dapat menentukan kasus ini sebagai penodaan terhadap agama karena masih harus menunggu rekomendasi dari MUI dan Kejaksaan Agung. "Kami masih menyelidiki siapa yang menyebarkan ajaran ini karena tiga orang yang kami amankan hanya ikut-ikutan," katanya.

Tersebarnya kelompok al-Qiyadah al-Islamiyah berawal dari pengakuan Irawan. Ketika diperiksa polisi ia mengatakan, pertama kali mengenal ajaran ini pada September 2006 dari seseorang bernama Roihin asal Sulawesi. Selain salat dan puasa, kalimat syahadat yang diucapkan juga berbeda karena menempatkan 25 nabi yang dipercaya umat muslim sejajar, sehingga bukan hanya Muhammad yang bisa disebut, tetapi nabi lain pun dapat diucapkan dalam kalimat syahadat. Sejak saat itu setiap bertemu dengan orang lain, ia berusaha menyampaikan ajaran yang membuatnya mencoret dan meralat beberapa kata di al-Qur'an. ([www.antara.co.id](http://www.antara.co.id), 20/9/07).

Sebelum ada penangkapan terhadap pengikut al-Qiyadah al-Islamiyah, pada 29 Juli 2007 di Masjid UGM diadakan tablig akbar dengan tema Pemurtadan di Balik al-Qiyadah al-Islamiyah. Acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Asy-Syariah ini menghadirkan pemateri Al Ustadz Abu Abdillah Luqman bin Muhammad Baabduh di samping itu dihadirkan pula saksi-saksi yang menjelaskan keberadaan kelompok/aliran al-Qiyadah al-Islamiyah.

Pertemuan tersebut seolah menjadi arena pengadilan *in absentia* terhadap al-Qiyadah al-Islamiyah. Dari pertemuan tersebut diungkapkan beberapa penjelasan para saksi yang menjelaskan ajaran-ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah yang dianggap menyimpang, antara lain:



1. Mereka menganggap, pimpinannya adalah Rasulullah yaitu bernama al-Masih al-Maw'ud.
2. Menghilangkan syariat shalat lima waktu dalam sehari semalam, dengan diganti sholat *lail*, mereka mengatakan bahwa dalam dunia yang kotor seperti ini, tidak layak kaum muslimin melakukan shalat lima waktu.
3. Menganggap orang yang tidak masuk kelompoknya dan mengakui bahwa pemimpin mereka adalah Rasul adalah orang musyrik. Hal ini sesuai yang di ungkapkan oleh seorang saksi yang anak kandungnya sampai saat ini setia dan mengikuti kajian-kajian kelompok ini. Anak kesayangannya tersebut tidak mau pulang ke rumah bersama kedua orang tua karena menganggap kedua orang tuanya musyrik.
4. Dalam dakwah, mereka menerapkan istilah *sittati ayyam* (enam hari) yang mereka terjemahkan menjadi enam tahapan, yaitu:
  - *Sirran* (diam-diam/sembunyi-sembunyi)
  - *Jahron* (Terang-terangan)
  - *Hijrah*
  - *Qital*
  - *Futuh*
  - *Khilafah*

Tidak hanya itu, meski tidak salat 5 waktu dan cukup salat malam, anggota al-Qiyadah al-Islamiah dijamin akan masuk surga. Kelompok al-Qiyadah al-Islamiah juga dianggap mempunyai kebiasaan aneh. Layaknya kitab kuning seperti yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, al-Qur'an yang seharusnya bersih dari segala coretan jutsru diberi arti dan tafsir sendiri di atas tulisan-tulisan ayat tersebut. Saat ini, al-Qur'an tersebut juga sedang diteliti dan diperiksa oleh aparat sebagai barang

bukti.

Sebagaimana dilaporkan [www.detik.com](http://www.detik.com) (20/9/07), Irawan cs hanya sebagai pengikut saja yang belum lama menjadi anggota pengajian kelompok tersebut. Mereka percaya kata '*dien*' bukan berarti sebagai agama, tapi sebuah sistem. Mereka juga percaya sistem yang dibawa Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu sudah tidak tegas lagi atau ada penyimpangan. Karena itu, mereka mempercayai akan datang yang dinamakan al-Masih al-Maw'ud.

Setelah MUI Bantul, penyesatan terhadap ajaran al-Qiyadah al-Islamiah juga diikuti oleh MUI Sumatera Barat. Melalui Keputusan Fatwa No.1/Kpt.F/MUI-SB/IX/2007 tanggal 24 September 2007, MUI Sumbar menyatakan ajaran al-Qiyadah al-Islamiah adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan dan telah keluar dari ajaran Islam. Sehubungan dengan fatwa sesat oleh MUI Sumbar markas ajaran al-Qiyadah di Jalan Dr. Sutomo No.12 Padang diserbu beberapa ormas Islam, Selasa (2/10) pagi. Seperti dirilis [www.singgalang.co.id](http://www.singgalang.co.id) (3/10), ormas Islam yang ikut menggerebek markas aliran tersebut antara lain Pagari Nagari, Majelis Mujahidin, Sapta, Front Masyarakat Pembela Islam dan gabungan beberapa organisasi mahasiswa. Akibatnya, petugas kepolisian terpaksa mengevakuasi setidaknya 12 pengikut aliran tersebut ke Mapoltabes.

Usai menyerbu markas al-Qiyadah massa menuju ke Kantor PT Usba di Jalan Veteran No.4 Padang. Mereka menduga pimpinan PT Usba sebagai pimpinan aliran tersebut. Oleh sebab itu massa minta PT Usba ditutup. Dari tempat ini Polisi mengevakuasi Dedi Priadi, 44, pemimpin aliran tersebut ke Mapoltabes Padang. Bersama Dedi Priadi, tampak juga dan Gerry (istri Dedi) dan tujuh anak Dedi Priadi.

"Hari ini kami mengamankan satu keluarga atas nama Dedi bersama anak-anaknya yang pagi tadi sempat menjadi per-

hatian masyarakat Padang ini karena diduga melakukan ajaran sesat. Kami sudah amankan mereka di Poltabes ini. Kami sekarang sedang melakukan pemeriksaan terhadap mereka, kami sedang menggali sebetulnya bagaimana ajarannya, apakah sudah tidak sesuai dengan aqidah Islam,” kata Kapoltabes Padang Kombes Drs. Tri Agus Heru P., didampingi Kasat Reskrim Kompol Mukti Juharsa, SiK., kepada wartawan, Selasa (2/10).

Kalau nanti terbukti ajaran tersebut melakukan penodaan terhadap ajaran Islam, kata Kapoltabes itu, maka akan dilakukan proses penyidikan kasus tersebut.

Setelah Sumbar, menyusul kemudian MUI Pusat. Bahkan MUI pusat meminta pemerintah melarang penyebaran paham al-Qiyadah, serta menindak tegas pemimpinnya.

”Masyarakat perlu mewaspadaikan aliran yang didirikan oleh Ahmad Moshaddeq ini, karena mengajarkan adanya nabi baru sesudah Nabi Muhammad dengan menobatkan dirinya sebagai nabi terakhir itu,” kata Ketua MUI, KH Ma`ruf Amin, di Kantor MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta, seperti dikutip [www.antara.co.id](http://www.antara.co.id), Kamis (4/10/2007)

Aliran tersebut mengajarkan Syahadat baru, yakni ”Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna Masih al-Mau`ud Rasul Allah”, di mana umat yang tidak beriman kepada ”al-Masih al-Mau`ud” berarti kafir dan bukan muslim.

Pendirinya Ahmad Moshaddeq, yang sejak 23 Juli 2006 setelah bertapa selama 40 hari 40 malam, mengaku dirinya mendapat wahyu dari Allah dan mengaku sebagai Rasul menggantikan posisi Muhammad SAW.

Selain itu, ujar Ma`ruf, aliran baru ini tak mewajibkan shalat, puasa dan haji, karena pada abad ini masih dianggap tahap perkembangan Islam awal sebelum akhirnya terbentuk Khilafah Islamiyah.

Kitab Suci yang digunakan adalah al

Qur`an, tetapi meninggalkan hadist dan menafsirkannya sendiri. Aliran tersebut juga mengenal penebusan dosa dengan menyerahkan sejumlah uang kepada al-Masih al-Mau`ud.

Dakwah aliran al-Qiyadah al-Islamiyah itu, disebutkannya, cukup mengkhawatirkan karena telah menyebar ke beberapa provinsi, antara lain di Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, dan tercatat ribuan orang mengikuti dakwahnya.

MUI menyatakan bahwa aliran ini berada di luar Islam, dan orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari ajaran Islam). ”Bagi mereka yang sudah terlanjur mengikutinya diminta bertobat dan segera kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan Quran dan hadist,” kata Ma`ruf.

Aliran tersebut, tambah Ma`ruf, telah terbukti menodai dan mencemari ajaran Islam karena mengajarkan sesuatu yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam. Dalam foto-foto yang dibebaskan MUI, Ahmad Moshaddeq di depan pengikutnya menggunakan sayap layaknya gambar dewa-dewa dalam literatur Yunani.

## 5. Penyesatan Kelompok Adat Dayak Dermayu

HASIL musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam se-Kabupaten Indramayu (12/9/07) meminta agar masyarakat menghentikan dan melarang aliran sesat yang mengatasnamakan ajaran Islam dan mendiskreditkan agama. ”Aliran sesat yang harus dibumihanguskan adalah al-Qiyadah al-Islamiyah, Suku Dayak Dermayu (atau Dayak Losarang, pen) dan lainnya yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, serta berpotensi menimbulkan keresahan dan kekerasan di tengah masyarakat,” tegas Ketua umum MUI KH. Ahmad Jamali didampingi ketua fatwa KH. Saerozi Bilal. Dia minta agar aliran Suku Dayak Losarang yang sekarang mulai banyak penganutnya, agar dihentikan.

(*Radar Cirebon*, 14 September 2007)

Menindak lanjuti hasil fatwa yang menyatakan suku dayak Losarang sesat, MUI Kabupaten Indramayu kembali menggelar pertemuan di Islamic Centre, Minggu (23/9/07). Selain membahas lanjutansosialisasi peraturan daerah (perda) larangan minuman beralkohol dan prostitusi, serta wajib belajar Madrasah Diniyyah, MUI bersama organisasi masyarakat (ormas) Islam juga merapatkan barisan, guna segera membekukan aliran yang dianggap sesat tersebut.

Ketua umum MUI KH. Ahmad Jamali didampingi ketua fatwa KH. Saerozi Bilal menegaskan pihaknya telah sepakat untuk menghentikan dan melarang aliran sesat yang mengatasnamakan Islam, namun mendiskreditkan agama seperti Suku Dayak Hindu Budha Segandu Losarang. Dijelaskannya, aliran yang diajarkan Takmad Diningrats bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. MUI mendesak kepala Kejaksaan Negeri Indramayu bersama anggota pemantau aliran kepercayaan untuk secepatnya mengambil langkah kongkrit.

Menurutnya, MUI sudah melakukan koordinasi dengan Kejari sekaligus meyerahkan hasil telaah terkait aliran suku dayak. Ia mengakui, pihaknya mempunyai kewajiban untuk meluruskan aliran kepercayaan di tengah masyarakat, sementara pelaksanaan di lapangan adalah wewenang kejari dan anggota PAKEM. Namun paling tidak fatwa MUI harus dijadikan pijakan atau dasar untuk melangkah selanjutnya. (*Radar Cirebon*, 24/9/07)

Karena merasa terdesak fatwa MUI, komunitas “Dayak Losarang” meminta perlindungan kepada anggota dewan di DPRD setempat. Mereka meminta perlindungan karena merasa keberadaan komunitasnya terancam menyusul adanya pernyataan MUI Kab. Indramayu yang menyatakan aliran Suku Dayak Losarang

bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, sehingga perlu dihentikan eksistensinya.

Hal itu terungkap menyusul kedatangan enam orang perwakilan dari komunitas “Dayak Losarang” ke DPRD Indramayu, (24/9/07). Di hadapan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Hasyim Junaedi, dua anggota komunitas “Dayak Losarang”, Dedi dan Warlam Wanalas menyatakan saat ini komunitasnya resah menyusul adanya pernyataan MUI Indramayu itu.

Selain fatwa MUI Indramayu, kata Dedi dan Warlam, hal lain yang juga memicu keresahan di komunitasnya adalah adanya pernyataan Camat Losarang Drs. Prawoto yang menyatakan komunitas “Dayak Losarang” telah membahayakan eksistensi negara dan pemerintahan sekaligus minta dibekukan. Pernyataan-pernyataan itu, kata Dedi dan Warlam, dapat mengundang sentimen dan antipati dari masyarakat dan dikhawatirkan dapat memicu terjadinya penyerangan dari pihak lain, seperti yang terjadi pada aliran dan komunitas lain. Oleh karena itu, komunitas “Dayak Losarang” meminta perlindungan kepada DPRD Indramayu agar tidak diganggu dan dibekukan aktifitasnya.

Terkait kehadiran anggota perwakilan komunitas “Dayak Losarang” tersebut, Ketua DPRD Indramayu, H. Hasyim Junaedi mengaku belum dapat berbicara banyak. “Prinsipnya kami akan terlebih dahulu mempelajari permasalahannya. Kami akan meminta komisi A untuk mengkajinya hingga dapat dipahami secara benar keberadaan komunitas tersebut” ujarnya. (*Pikiran Rakyat*, 25/9/07).

## 6. MUI Tasikmalaya Sesatkan Aliran Wahidiyah

AWAL Juni 2007, MUI Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengeluarkan fatwa nomor:45/Kep/MUI-TSM/2007, bahwa ajaran disampaikan Wahidiyah di daerah Purwarahayu, Kec. Taraju, Tasikmalaya

adalah yang sesat dan menyesatkan. Menurut keterangan Ketua Umum MUI Kab. Tasikmalaya KH. Dudung Abdul Halim, MA, fatwa sesat MUI dikeluarkan setelah terlebih dahulu dilakukan kajian oleh Komisi Fatwa MUI Kab. Tasikmalaya, yang hasilnya menyatakan paham Wahidiyah menyalahi ajaran al-Quran dan Hadits. Dengan dikeluarkannya fatwa sesat, papar Kiai Dudung, MUI minta kepada pengikut aliran Wahidiyah untuk kembali ke ajaran Islam yang sejalan dengan al-Qur'an dan Hadits.

Pengkajian terhadap aliran Wahidiyah yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Kab. Tasikmalaya, tambah Kiai Dudung, dimulai semenjak satu bulan terakhir dengan membahas buku yang memuat ajaran yang dimiliki aliran Wahidiyah, serta mendengarkan keterangan-keterangan mantan pengikut dan tokoh-tokoh setempat. Di antara ajaran yang dakwahkan aliran Wahidiyah, ujar Kiai Dudung, menganggap Ghauts Hadza Zaman, mempunyai kewenangan menanamkan dan mencabut keimanan seseorang. Hal itu sebagaimana tercantum dalam kumpulan teks ajaran aliran Wahidiyah, di halaman 66. Selain itu, Mbah Abdul Majid, tokoh utama aliran Wahidiyah, juga dinyatakan sebagai juru selamat bagi umat di zaman sekarang.

Ketika ditanya kapan aliran Wahidiyah berkembang di desa Sumahmadu Taraju, Kiai Dudung mengatakan semenjak dua bulan yang lalu. Dan diketahui dipimpin oleh seseorang yang bernama Abas yang juga penduduk asli Sumahmadu Taraju. Dudung juga mengatakan tidak tahu, apakah aliran Wahidiyah yang berkembang di daerahnya sama dengan Tarekat Wahidiyah yang berpusat di Kediri Jawa Timur.

Menanggapi fatwa tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Penyiar Sholawat Wahidiyah (PSW) Jabar melayangkan surat Nomor 328/A/DPW PSW-45/VI/2007 yang dilayangkan pada MUI Ka-

bupaten Tasik. Dalam surat itu disebutkan, MUI telah gegabah dalam mengeluarkan fatwa omor 45/Kep./MUI-TSM/V/2007. Karena itu, selain menuntut pencabutan fatwa, PSW juga meminta MUI menyampaikan permintaan maaf yang disiarkan melalui beberapa media cetak dan elektronik beberapa kali berturut-turut.

"Apabila dalam waktu 7 kali 24 jam mulai 2 Juni 2007 kami tidak mendapat jawaban secara tertulis dan tindakan konkret, dengan sangat menyesal persoalan ini kami bawa ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia", kata H Pandang Musili Ketua DPW PSW Jabar (2/6/07). Fatwa MUI dinilai terburu-buru dan cacat hukum. Dari redaksinya saja, bisa dilihat bahwa MUI Tasikmalaya, belum memahami isi, maksud, tujuan dan dasar secara detail tentang salawat Wahidiyah (6/6/07). Pandang mengatakan, Penyiar Sholawat Wahidiyah yang berpusat di Pesantren At-Tahtzib Rejoagung, Ngoro, Jombang tidak pernah menerbitkan buku "Kumpulan Teks Wahidiyah". Jadi tuduhan ajaran Wahidiyah adalah sesat, jelas tidak benar. Tuduhan MUI Kab. Tasikmalaya itu merugikan keberadaan PSW baik di dalam maupun luar negeri. Justru fatwa MUI Kab. Tasikmalaya sangat gegabah dan bisa menimbulkan keresahan. (*Pikiran Rakyat*, 8/6/07).

Namun, beberapa hari kemudian, ada pernyataan berbeda dari DPW PSW Jawa Barat. Mereka menyatakan, kelompok Wahidiyah yang ada di Desa Purwarahayu, Kec. Taraju, Kab. Tasikmalaya, bukan jemaahnya. Hal itu, berdasarkan laporan tim pencari fakta yang dikirim oleh DPW PSW Jabar, ke daerah Taraju. (*Pikiran Rakyat*, 13/6/07). Dengan adanya pernyataan ini, ancaman PSW Jabar yang akan menggugat MUI Kab. Tasikmalaya, jika tidak mencabut fatwa yang menyebutkan Wahidiyah Taraju, sesat, dan menyesatkan menjadi tidak relevan. DPW PSW Jabar ingin mengatakan bahwa Wahidiyah

Taraju adalah jenis Wahidiyah yang berbeda dengan PSW.

Ketua MUI Kab. Tasikmalaya, K.H. Dandung Abdul Salam, Selasa (12/6/07), mengatakan, DPW PSW Jabar telah mengirim surat ke MUI Tasikmalaya tertanggal 9 Juni 2007. Isinya menyebutkan bahwa Wahidiyah Taraju bukan kelompoknya. Alasannya, Wahidiyah Taraju berasal dari Pengamal Sholawat Wahidiyah yang mengatasnamakan dari Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pontren Kedunglo, Kediri pimpinan Kiai Abdul Latif Madjid. (*Pikiran Rakyat*, 13/6/07).

## Pengikut Wahidiyah Diserang

BEBERAPA bulan setelah keluar fatwa MUI tersebut, kelompok wahidiyah di daerah Sindangasih, Kel. Cigantang, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya di serang massa Front Pembela Islam (FPI) (12/9/07). Bangunan pabrik, tempat ibadah, dan lima rumah pengikut aliran Yayasan Perjuangan Wahidiyah, di Kampung Sindangasih, Cigantang dibakar serta dirusak massa.

Tidak ada korban jiwa dalam aksi amuk massa tersebut, namun kerugian materi yang dialami oleh korban, puluhan hingga ratusan juta rupiah. Saat aksi berlangsung, sebagian besar penghuni rumah sudah mengungsi, kecuali keluarga Aef Saepulmillah. Bangunan rumah yang luluh lantak, akibat dibakar yaitu milik Dadang yang ditempati oleh Ateng. Rumah yang dibakar ini masih satu kompleks dengan tempat ibadah dan bangunan pabrik pintalan benang serta bordir.

Sedangkan, empat rumah yang dirusak adalah rumah permanen milik Dadang, Aef Saepulmillah, Aen, dan Atang, yang masih ada ikatan persaudaraan. "Saya tidak bisa terima dengan perlakuan ini karena sangat brutal. Mohon, kepada polisi untuk mengusutnya," kata Aef, yang juga mantan

Kepala Desa Cigantang, sebelum menjadi kelurahan. Menurut Nini, warga Sindangasih, massa tidak kenal datang ke daerahnya, Rabu malam pukul 23.00. Mereka menggunakan tutup muka, sehingga sulit dikenali satu sama lainnya. Ketika itu, Nini melihat massa merusak rumah Atang, dengan cara dilempari memakai batu. (*Pikiran Rakyat*, 14/9/07).

Sehari sebelum melakukan serangan menjelang tengah malam, pada siang hari, seratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) mendatangi salah satu rumah yang dianggap sebagai pusat pertemuan kelompok Wahidiyah di Kampung Keretek, Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (11/9) sekitar pukul 15.00 WIB. Kepada warga setempat, FPI menyatakan akan membersihkan daerah itu karena Wahidiyah dinilai telah merusak kesucian Islam. Di rumah tersebut, FPI tidak menemukan anggota Wahidiyah. Anggota FPI kemudian mencabut spanduk berlabel Wahidiyah dan membakarnya. Aksi pembakaran ini didiamkan oleh polisi yang berjaga di rumah itu. Usai aksi pembakaran, anggota FPI melempari rumah itu dengan batu serta telur busuk. Melihat itu, polisi pun segera menghentikan dan kelompok FPI segera membubarkan diri. ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) 12/9/07).

Hingga laporan ini ditulis, aparat kepolisian belum melakukan tindakan apapun terhadap perusuh. Mantan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) geram dengan sikap pemerintah yang tidak bertindak tegas terhadap kelompok berlabel Islam yang merusak gedung dan harta orang lain. Selama empat bulan terakhir, kelompok ini menyerang dan merusak gedung milik aliran Ahmadiyah dan Wahidiyah di Tasikmalaya.

"Ya (Presiden SBY, red.) tidak mampu mengendalikan keadaan. Yakni, ketidakmampuan untuk mengawasi dan mengambil tindakan yang tepat seperti terjadi di Kabupaten dan Kotamadya Tasikma-

laya sehingga terjadi tindakan main hakim sendiri oleh beberapa elemen masyarakat,” kata Gus Dur saat jumpa pers yang digelar di Gedung PBNU Jakarta, Selasa (18/9/2007). Oleh sebab itu Gus Dur meminta polisi menindak para tokoh yang menggerakkan aksi-aksi penyerangan tersebut.

Di samping itu, Gus Dur juga minta agar aparat menindak aktor-aktor penting MUI. Alasannya, beberapa aksi penyerangan oleh kelompok berlabel Islam terhadap aliran-aliran Islam di Tasikmalaya dipicu oleh Fatwa MUI Tasikmalaya yang menyebutkan bahwa aliran-aliran seperti Ahmadiyah dan Wahidiyah adalah sesat, dan menyesatkan. ([www.gusdur.net](http://www.gusdur.net)).

### Akan Dilarang Beraktivitas

KEPALA Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya Ajun Komisaris Besar Suntana mengungkapkan pemerintah kota tengah mengerjakan surat keputusan bersama (SKB) yang menyatakan kelompok Wahidiyah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di luar ataupun di dalam. “Tidak boleh menyebarkan ajaran mereka,” ujar Suntana sebagaimana dikutip *Koran Tempo* (2/10/07). Hal tersebut, menurut Suntana, disepakati dalam pertemuan antara para ulama dan unsur musyawarah pimpinan daerah Kota Tasikmalaya.

Tindakan ini, menurut dia, merupakan kelanjutan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya yang menyatakan bahwa ajaran Wahidiyah adalah ajaran yang menyimpang. Suntana mengungkapkan, sebelum adanya penyerbuan sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, telah ada kesepakatan antara warga dan pengurus Wahidiyah di Kereteg sebelum penyerbuan. Intinya agar penganut Wahidiyah tidak melakukan dakwah ke luar. Namun, pada awal September lalu, para pengurus Wahidiyah Kereteg ternyata menjadi panitia pertemuan penganut Wahidiyah di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. “Masyar-

akat resah,” katanya. Ia pun mendesak agar para penganut Wahidiyah menjalankan kesepakatan dengan warga. Di sisi lain, ia mendesak masyarakat agar tidak bertindak anarkistis.

Wakil Ketua Wahidiyah Jawa Barat, Ikhwan, mengecam niat Pemerintah Kota Tasikmalaya. “Itu tindakan melawan hukum,” katanya. Hingga laporan ini dibuat, warga Wahidiyah yang menjadi korban kekerasan di Kereteg masih mengungsi dan anak-anaknya sampai tidak lagi sekolah. Ikhwan juga membantah bahwa sebenarnya tak ada kesepakatan antara warga Wahidiyah dan masyarakat. Menurut dia, kaum Wahidiyah dipaksa menandatangani surat kesepakatan tersebut. (*Koran Tempo* (2/10/07)).

### 7. Warung Buka di Bulan Puasa Diserang

DENGAN alasan menjaga kesucian bulan Ramadhan puluhan anak belasan tahun beratribut jubah putih dan juga berseragam SMP mensweeping warung makan yang tetap buka di siang Ramadhan di Pasar Leuwiliang, Bogor (21/9). Namun warung-warung di tempat tersebut sedang tutup. Mereka akhirnya menyegel warung-warung tersebut.

Sekitar 100 anggota Front Pembela Islam (FPI) Ciamis, Jawa Barat, Ahad (23/9), bertindak keras terhadap warung-warung makan yang dianggap tidak menghormati bulan puasa. Tempat-tempat yang dicurigai menjual minuman beralkohol juga tidak luput dari razia. Massa FPI menjadi beringas saat mengetahui ada tempat makan yang berjualan secara terbuka. Mereka merusak warung itu dan memukul seorang pelanggannya. Sedangkan sang pemilik tak bisa berbuat apa-apa. Tak hanya itu, seorang pria yang dianggap preman turut dipukuli tanpa alasan yang jelas. Terminal bus Ciamis ikut menjadi sasaran razia. Salah satu warung jamu yang menjual minuman keras didobrak. Satu dus minuman keras diambil dan dihancurkan

di depan kios.

Selama razia, praktis tidak ada polisi yang terlihat di lokasi. Sedangkan warga tak dapat berbuat apa-apa menyaksikan tindakan tersebut. Kepala Kepolisian Resort Ciamis Ajun Komisariss Besar Polisi Aries Syarif menyatakan, ia menyangkan adanya kekerasan dalam razia tersebut.

Situasi berbeda di Bantul, Yogyakarta, saat laskar Front Jihad Islam merazia tempat maksiat dan lokasi penjualan minuman keras, pekan silam. Ketika itu, aparat Polres Bantul bertindak keras dan meminta razia dihentikan. Alasannya, warga sipil tidak berwenang menggelar razia. ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), 24/09/07).

Bukan hanya di Ciamis dan Bantul, aksi yang sama juga terjadi di Bojong, Depok. Ratusan warga dari FPI menggelar *sweeping* ilegal dan membabi buta dengan merusak sebuah kafe dan penginapan di Jalan PWRI Desa Bojong, Depok, Senin (1/10/07) dini hari. Kehadiran massa yang tak terduga oleh pemiliknya, membuat mereka tak bisa menyelamatkan tempat hiburan dan penginapan itu. Bangunan terbuat dari kayu dibakar dan beberapa kaca pecah.

Data Polda Metro Jaya menyebutkan, sekitar pukul 00.30 WIB, di sela-sela kesunyian sekitar Desa Bojong dikejutkan dengan datangnya ratusan warga tersebut. Mereka sempat bertemu dengan salah satu pengelola penginapan setempat, namun tidak lama kemudian, terjadi aksi anarkhis oleh rombongan orang yang berasal dari organisasi. Dengan alasan untuk menertibkan lingkungan dari ancaman perbuatan maksiat, mereka merusak barang atau benda di lokasi itu.

Mengantisipasi agar aksi tidak meluas, Polsek Bojonggede langsung membubarkan massa, yang dipimpin Ayib tersebut. Kapolres Depok, Kombes Pol Imam Pramukarno memerintahkan jajarannya agar kasus main hakim sendiri di wilayah Bojonggede itu, secepatnya dituntaskan. Para

pelakunya harus dihukum sesuai dengan ketentuan. Hal itu juga sesuai dengan permintaan Sekjen Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia (Aspehindo) Adrian Maelite kepada SP. "Polda Metro Jaya diminta untuk tidak ragu menindak tegas organisasi massa yang berbendera agama, yang melakukan *sweeping* terhadap tempat-tempat hiburan pada bulan Ramadan ini. Kami minta polisi menindak mereka dengan tegas. Karena apa yang mereka lakukan adalah tindakan kriminal, bukanlah tindakan agama," tegas Adrian.

Adrian mengemukakan, tidak satu pun agama di dunia ini yang mengajarkan tindakan kekerasan atau kriminal. Karena itu sudah jelas, apa yang dilakukan organisasi tersebut hanya berkedok agama untuk melakukan tindakan kriminal. "Siapa pun di dunia ini yang melakukan tindakan kriminal harus diproses hukum. Jangan membawa-bawa agama untuk melakukan tindakan kriminal. Polisi harus memproses mereka. Karena yang memiliki wewenang untuk itu adalah Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya," kata dia.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya, karena beberapa hari terakhir ini, telah menurunkan aparatnya dalam jumlah yang cukup banyak untuk berpatroli untuk mengawasi jalannya kegiatan malam di bulan puasa ini. "Kami berharap, petugas tidak hanya menindak organisasi-organisasi yang melakukan *sweeping* liar, tetapi juga mau menindak pengusaha hiburan yang melanggar. Ini semua agar ada keadilan," kata dia. Dia mengakui, meski pihaknya sudah semaksimal mungkin menaati peraturan, namun masih saja ada pengusaha yang nakal. Beberapa pengusaha hiburan malam mendapat peringatan, karena dinilai melanggar jam operasional. (*Suara Pembaruan*, 1/10/07).

## Analisis

Dari kasus-kasus yang muncul selama periode pelaporan ini ada beberapa hal yang layak untuk dicatat:

1. Dalam kasus penyesatan terhadap aliran keagamaan tertentu di berbagai daerah, MUI daerah setempat senantiasa menjadi aktor utamanya. Hampir tidak ada kasus penyesatan yang tidak melibatkan MUI. Kalau arus penyesatan dipandang sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama, maka MUI –suka atau tidak- menjadi bagian dari ancaman tersebut. Memang, tidak semua eksponen MUI mempunyai pikiran seperti ini, namun tren MUI menjadi “polisi agama” menguat dimana-mana. Hal ini menandai dua hal sekaligus. Di satu sisi hal ini bisa dibaca sebagai pertanda bahwa MUI menjadi institusi keagamaan yang semakin “bergigi”, dan di sisi lain hal ini juga pertanda menguatnya kelompok fundamentalis melalui institusi agama yang kelahirannya diinisiasi pemerintah orde baru.
2. Dengan sikap demikian, MUI telah menjadi “kuda tunggangan” kelompok-kelompok radikal untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok yang divonis sesat oleh MUI. Kasus penyerangan Wahidiyah di Tasikmalaya, al-Qiyadah al-Islamiyah dan sebagainya jelas menunjukkan hal tersebut. Bila hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin kehidupan keagamaan akan terus diwarnai dengan peristiwa-peristiwa kekerasan.
3. Akibat lebih jauh, kelompok-kelompok radikal menjadi di atas angin dan bisa melakukan tindakan-tindakan anarkhis lainnya. Penutupan paksa beberapa kelompok Islam terhadap warung-warung yang buka di siang Ramadhan seperti di Ciamis, Bojong Depok dan tempat-tempat lain jelas menunjukkan hal itu. Hal ini jelas perbuatan illegal yang menyerobot tugas aparat pemerintah.
4. Aparat keamanan (polisi) sering mengambil langkah berbeda untuk menangani kasus yang kurang lebih sama. Di tempat tertentu, seperti Bantul, polisi bisa bertindak cepat dan tegas untuk menghalangi kelompok Front Jihad Islam merazia tempat maksiat dan lokasi penjualan minuman keras sehingga aksi itu bisa dicegah. Namun, di Ciamis dan Bojong aparat justru tidak hadir untuk mencegah aksi itu.
5. Pola mengorbankan orang yang menjadi korban masih sering terjadi. Korban yang seharusnya mendapat perlindungan justru ditambah deritanya, terutama oleh aparat. Hal ini bisa dilihat dari kasus Wahidiyah. Mereka divonis sesat, tempat tinggalnya diserang, tapi pemerintah tidak memberi perlindungan kepada mereka. Aparat pemerintah justru berencana untuk membekukan dan melarang Wahidiyah untuk melakukan aktifitas. Pola seperti ini tidak hanya dialami Wahidiyah, tapi juga dialami kelompok Ahmadiyah di beberapa tempat.



## Rekomendasi

Dari berbagai kasus dan analisis di atas, dalam periode pelaporan ini ada beberapa hal yang bisa direkomendasi:

1. Perlu dipikirkan langkah-langkah untuk mereformasi MUI dalam segala tingkatan. Langkah reformasi MUI bisa dilakukan dengan beberapa cara: *pertama*, melepaskan posisi istimewa MUI dengan pemerintah dalam berbagai level. Posisi istimewa seperti soal “dana abadi”, dianggap representasi suara Islam dan sebagainya perlu ditinjau ulang. *Kedua*, kelompok-kelompok Islam progresif perlu memikirkan kemungkinan untuk mengendalikan MUI. Hal ini penting agar MUI tidak dikendalikan oleh kelompok Islam radikal.
2. Aparat kemanan penting untuk bertindak lebih tegas kepada kelompok-kelompok penyerang, tidak justru menindak korban. Fungsi aparat pemerintah untuk melindungi warga negara harus menjadi landasan kerja secara profesional. Aparat tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan siapapun dan atas nama apapun.[]